

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DENGAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA II**

SKRIPSI

OLEH :

**CHURIN HUSNIA ANTI
18.833.0003**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

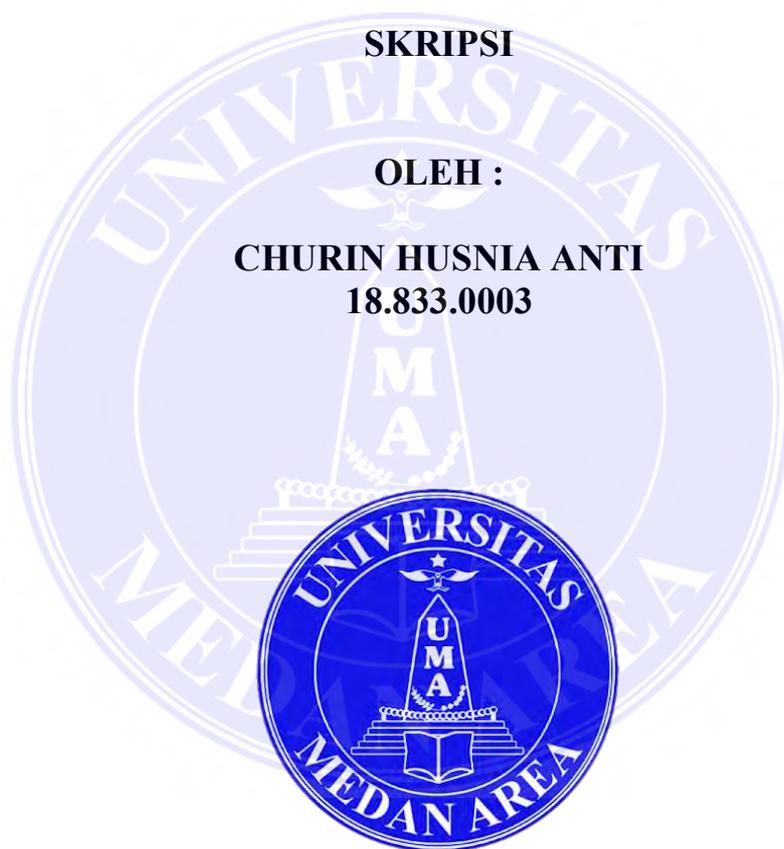
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DENGAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA II**

SKRIPSI

OLEH :

**CHURIN HUSNIA ANTI
18.833.0003**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DENGAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA II**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

**CHURIN HUSNIA ANTI
18.833.0003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Nama : Churin Husnia Anti

Npm : 18.833.0003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding

Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM

(Linda Lorex, SE, M.Si)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :

(Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Dekan

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 13 April 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II**”, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Churin Husnia Anti
NPM: 18.833.0003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Churin Husnia Anti
NPM : 18.833.0003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberi kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 13 April 2023
Yang menyatakan,



Churin Husnia Anti
NPM: 18.833.0003

ABSTRACT

The goal of the research was to examine how the Office of the Ministry of Public Works of the Sumatra River Region II measured financial performance in relation to the execution of the budget using the Value For Money technique. Descriptive research is the kind of study that this is. The population used in this analysis is based on budgetary information from the Sumatra River Region II Office of the Ministry of Public Works from 2019 to 2021. Budget information from the Office of the Ministry of Public Works of the Sumatra II River Basin for the years 2019–2021 serves as the study's sample. These study findings are quantitative data. This study used both primary and secondary data as its data sources. ways for gathering data via interviews and documentation. Descriptive qualitative analysis of the data is the method used. The results of this study show that the realization of expenditures in 2019 and 2020 for personnel expenditures is not economical because the realization exceeds 100%, while in 2021 it is economical because the realization is less than 100% and expenditure on goods and services and capital expenditures from 2019-2021 is very economical because of its realization. less than 100%. The efficiency level for three years is efficient because the realization is less than 100%. And the level of effectiveness in 2019-2021 is effective because the percentage reaches 100%.

Keywords: *Financial Performance Measurement, Budget Execution, Value For Money*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II mengukur kinerja keuangan terkait dengan pelaksanaan anggaran dengan memakai teknik Value For Money. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian ini. Populasi yang dipakai dalam analisis ini diambil dari anggaran tahun 2019–2021 untuk Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sungai Sumatera II. Informasi anggaran dari Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Sungai Sumatera II tahun 2019–2021 dijadikan sebagai sampel kajian. Temuan penelitian ini merupakan data kuantitatif. Penelitian ini memakai data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. cara pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis deskriptif kualitatif terhadap data merupakan metode yang dipakai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2019 dan 2020 tidak ekonomis sebab melebihi 100%, sedangkan tahun 2021 ekonomis sebab kurang dari 100%, dan kinerja belanja barang dan jasa sebagai serta belanja modal dari tahun 2019 hingga 2021 sangat ekonomis sebab kurang dari 100%. Tingkat efisiensi selama tiga tahun hasilnya adalah efisien sebab realisasinya kurang dari 100%. Dan tingkat efektivitas pada tahun 2019-2021 hasilnya yakni efektif sebab persentasenya mencapai 100%.

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, *Value For Money*

RIWAYAT HIDUP



Nama	Churin Husnia Anti
Npm	188330003
Tempat, Tanggal Lahir	Suka Makmur, 11 April 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Muhammd Sofyan
Ibu	Sudarni
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NEGERI 36 MEDAN
SMK	SMK MULTI KARYA
Riwayat Studi di UMA	Pernah mengikuti KBMI (Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa) pada tahun 2021
Pengalaman Pekerjaan	-
NO. HP/WA	081397729170
E-mail	Husniachurin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.WB

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat serta karunia-Nya, hingga peneliti bisa selesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II”** tanpa kendala apapun. Saya berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebab beliau sudah membawa umatnya ke dunia yang menyenangkan.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, arahan, dan dukungan yang sudah diberikannya, proposal skripsi ini tidak akan bisa selesai. Maka, peneliti sangat menghargai seluruh pihak yang sudah memberi dukungan moril ataupun materiil, khususnya untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., Msc. sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dosen Sekretaris Penguji yang sudah banyak memberi saran serta masukan saat pengerjaan skripsi ini.
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM, sebagai Dosen Pembimbing dimana sudah banyak membantu, membimbing serta memberi arahan kepada peneliti saat mengerjakan skripsi.

5. Ibu Linda Lores, SE, M.Si, sebagai Dosen Penguji yang sudah banyak memberi saran serta pengetahuan baru untuk peneliti dalam mengembangkan skripsi.
6. Ibu Sudarni yang sudah mendukung dan mendoakan saya sejak awal kuliah, menjadi inspirasi dan panutan saya selama saya mengerjakan skripsi. Belum lagi ayah saya Muhammad Sofyan yang selalu memberi motivasi, Adik saya Muhammad Oby Al-faruq, Mamak saya Ibu Kartini, Opa saya Nurdin, Kakak saya Vivi Anggreyani, Tante saya Adinda Nabella, Sepupu saya Naila Talenta Alysha sudah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabat istimewa saya yang banyak membantu saya juga memberi semangat yakni Fitriani Batubara, Desy Mandawati, Mely Daulay, Ira Silvia, Muhammad Nurhuda, Muhammad Fikri, Margareth Serevina Simbolon, Julianti Ningsih, Muharny serta teman-teman lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Satu-satunya hal yang dapat peneliti tawarkan kepada mereka masing-masing adalah doa agar Allah memimpin setiap jalan hidup mereka dan membalas kemurahan hati mereka dengan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Peneliti sadar masih banyak permasalahan saat penyusunan skripsi ini, maka peneliti selalu menerima kritik juga saran.

Medan, 13 April 2023



Churin Husnia Anti

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja	8
2.1.1. Pengertian Kinerja.....	8
2.1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	9
2.2. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.....	10
2.3. Siklus Pengukuran Kinerja	12
2.4. Manfaat dan Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	13
2.4.1. Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja.....	13
2.4.2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	14
2.5. Prinsip-Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja	15
2.6. Metode Value For Money 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomi)	15
2.6.1. Pengertian <i>Value For Money</i>	15
2.6.2. Konsep Umum 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi)	16
2.6.3. Manfaat Konsep 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi)	18
2.7. Teknik Pengukuran Kinerja	19
2.7.1. Ekonomis.....	19
2.7.2. Efisiensi	20
2.7.3. Efektivitas.....	21
2.8. Anggaran Sektor Publik	22
2.9. Akuntansi Sektor Publik.....	23
2.9.1. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	24
2.10. Laporan Realisasi Anggaran	25
2.10.1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran	25
2.10.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	26
2.10.3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	26
2.11. Penelitian Terdahulu	26
2.12. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.1.1. Jenis Penelitian	34

3.1.2. Tempat Penelitian.....	35
3.1.3. Waktu Penelitian	35
3.2. Populasi	36
3.3. Sampel.....	36
3.4. Definisi Operasional Variabel	36
3.5. Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1. Jenis Data	37
3.5.2. Sumber Data	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	38
3.7. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Singkat Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II	40
4.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Struktural dan Pembantu Pejabat Struktural.....	49
4.3. Data Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II	67
4.4. Data Realisasi Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	69
4.5. Hasil Penelitian.....	70
4.5.1. Pengukuran Ekonomis	70
4.5.2. Pengukuran Efisiensi	78
4.5.3. Pengukuran Efektivitas.....	82
4.6. Pembahasan	85
4.6.1. Value For Money Dari Segi Ekonomis Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	85
4.6.2. Value For Money Dari Segi Efisiensi Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	88
4.6.3. Value For Money Dari Segi Efektivitas Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	89
4.6.4. Review Dengan Penelitian Terdahulu	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1. Simpulan	92
5.2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	4
Tabel 1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	5
Tabel 1.3. Rincian Realisasi Biaya Operasional Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 4.1. Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	67
Tabel 4.2. Realisasi Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	69
Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II	71
Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis	77
Tabel 4.5. Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	79
Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi	82
Tabel 4.7. Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II	83
Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Pengukuran Kinerja.....	13
Gambar 2.2. Konsep 3E	17
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1. Logo Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	45
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera II.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dan Data Realisasi Biaya Operasional Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II	97
Lampiran 2.	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun 2019	98
Lampiran 3.	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun 2020	99
Lampiran 4.	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun 2021	100
Lampiran 5.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun (2019-2021).....	101
Lampiran 6.	Tabel Hasil Penelitian Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas	102
Lampiran 7.	Surat Izin Penelitian.....	104
Lampiran 8.	Surat Balasan Izin Penelitian.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Evolusi lingkungan organisasi, baik didalam ataupun diluar perusahaan, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk memberi kinerja yang dibutuhkan. Sejauh mana suatu organisasi bisa meraih tujuan berdasarkan tujuan yang ditentukan dapat dipakai untuk mengukur keberhasilannya.

Kinerja keuangan menurut Hutabarat (2020) adalah evaluasi sebaik apa suatu perusahaan sudah mematuhi pedoman pelaksanaan keuangan yang tepat serta akurat.

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur derajat pencapaian organisasi. Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dimanfaatkan dalam konteks organisasi sektor publik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat penerima layanan tentunya memberi evaluasi terhadap kinerja organisasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Gagasan pengukuran kinerja adalah nilai uang. Value for Money yakni metrik kinerja sektor publik dimana menunjukkan jika anggaran (dana) yang dikeluarkan memberi nilai khusus untuk masyarakat. Indikasi di atas adalah ekonomis, efektif, dan efisien. Analisis kemampuan organisasi sektor publik untuk meminimalisir jumlah sumber daya input yang mereka gunakan, khususnya dengan

meminimalisir pemborosan dan pengeluaran yang tidak efektif, dari perspektif ekonomi. Efisiensi adalah rasio output-to-input yang sesuai dengan kriteria ataupun tujuan kinerja yang ditetapkan.

Efisiensi dan efektivitas ditunjukkan oleh tingkat tercapainya tujuan program dengan tujuan yang sudah ditentukan dan pencapaian output maksimum dengan input terendah. Informasi tentang kinerja organisasi sangat penting sebab mencapai tujuan tertentu yang direncanakan adalah tujuan yang dinyatakan organisasi. Untuk menentukan apakah proses kerja organisasi saat ini sesuai dengan rencana yang diantisipasi ataupun tidak, informasi tentang kinerja organisasi dapat dipakai. Kapasitas lembaga pemerintah, bergantung pada sumber daya yang diawasinya, untuk menghasilkan hasil seperti yang direncanakan akan diakui sebagai keberhasilan lembaga itu melalui penilaian kinerja. Pemerintah daerah harus memakai uangnya dengan cara yang terjangkau, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kebutuhan akan anggaran dalam suatu organisasi ataupun instansi menjadi sangat penting untuk mencapai visi, maksud, dan tujuan organisasi itu. Perusahaan ataupun agensi terkemuka pasti akan menganggarkan uangnya dan mengawasi pekerjaan yang dilakukannya. Organisasi dan instansi dapat lebih mudah memperkirakan pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ataupun kegiatan yang dilakukan jika memiliki anggaran. Anggaran biaya operasional merupakan bagian dari anggaran yang harus dibuat oleh organisasi ataupun instansi. Salah satu elemen terpenting dalam memastikan kelangsungan operasi suatu organisasi adalah anggaran biaya operasional. Biaya yang akan dikeluarkan guna mencukupi tuntutan instansi dimasukkan dalam anggaran biaya operasional.

Anggaran biaya operasional dipakai untuk mendanai proyek di dalam organisasi dan untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. Perencanaan serta manajemen biaya dalam hal operasi diperlukan untuk aktivitas saat ini.

Salah satu instansi pemerintah yang mengelola sumber daya air di wilayah sungai adalah Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Pekerjaan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas agar sumber daya air dapat dilestarikan dan dipakai. dan mengelola efek merusak air di sungai, pantai, bendungan, danau, waduk, sistem irigasi, lahan basah, kolam, dan tempat penyimpanan air lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II memiliki keterkaitan yang terus menerus dengan biaya operasional, termasuk belanja umum dan administrasi, hingga operasional instansi itu bergantung pada biaya operasional yang harus didukung.

Agar rencana instansi berjalan sesuai rencana, Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II harus tetap menganggarkan pengeluaran, termasuk belanja operasional, secara efektif dalam setiap kegiatan operasionalnya yang menjadi faktor pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dan munculnya pungutan-pungutan lain yang tidak perlu yang dapat meningkatkan biaya operasional badan itu, Kantor Wilayah Sungai Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran biaya operasional yang mendesak. Dengan membandingkan apa yang direalisasikan dengan apa yang diharapkan berdasarkan anggaran, maka anggaran itu dapat dimanfaatkan.

Untuk mengetahui kinerja pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Sungai Basin II Sumatera II hanya dibandingkan anggaran dan realisasinya; jika biaya direalisasikan di atas anggaran yang ditetapkan, proyek dianggap tidak berhasil; jika biaya direalisasikan di bawah anggaran yang ditetapkan, proyek dianggap berhasil. Permasalahan di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum adalah kinerja instansi itu dalam menjalankan anggaran pemerintah pusat di bawah standar, yang menunjukkan bahwa anggaran itu masih belum ekonomis, efektif, ataupun efisien berdasarkan fakta yang ada.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kantor Kementerian PU Balai Wilayah
Sungai Sumatera II
Tahun Anggaran 2019-2021

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2019			
Belanja Pegawai	3.409.374.000	3.700.374.000	108,53%
Belanja Barang dan	27.504.568.000	26.776.440.000	97,35%
Jasa	37.200.598.000	36.612.658.755	98,41%
Belanja Modal			
Total	65.114.540.000	57.819.587.999	88,79%
Tahun 2020			
Belanja Pegawai	3.000.000.000	3.036.413.000	101,21%
Belanja Barang dan	21.267.101.000	18.170.516.244	85,43%
Jasa	25.371.581.000	24.737.793.986	97,50%
Belanja Modal			
Total	49.638.682.000	45.944.723.230	92,55%
Tahun 2021			

Belanja Pegawai	3.000.000.000	2.702.647.000	90,08%
Belanja Barang dan	27.918.328.000	22.980.691.191	82,31%
Jasa	9.837.084.000	9.601.849.493	97,60%
Belanja Modal			
Total	40.755.412.000	26.645.187.684	65,37%

Sumber: Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Berdasarkan tabel diatas bahwa anggaran belanja pegawai Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada tahun 2019 dan 2020 Jumlah aktual yang direalisasikan melebihi anggaran yang dialokasikan. Sementara anggaran belanja pegawai tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, hal yang sama tidak berlaku untuk anggaran barang dan jasa ataupun anggaran belanja modal dari tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2019-2021

(dalam satuan rupiah)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1.	2019	88.440.000.000	91.250.202.000	103,17%
2.	2020	87.000.000.000	87.770.000.000	100,88%
3.	2021	86.000.000.000	86.250.202.000	100,29%
	TOTAL	261.440.000.000	265.270.404.000	101,46%

Sumber: Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Berdasarkan tabel diatas anggaran pendapatan pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II dari tahun 2019-2021 dilihat dari keseluruhan realisasi pendapatannya mengalami peningkatan sejumlah 101,46% hal ini disebabkan sebab tercapainya target pemungutan pajak

Tabel 1.3
Rincian Realisasi Biaya Operasional Kantor Kementerian PU Balai Wilayah
Sungai Sumatera II
Tahun Anggaran 2019-2021

(dalam satuan rupiah)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2019	40.220.000.000	30.220.000.000	75,1%
2.	2020	30.000.000.000	25.000.000.000	83,3%
3.	2021	42.440.000.000	35.440.000.000	83,5%
	TOTAL	112.660.000.000	90.660.000.000	80,4%

Sumber: Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Berdasarkan data yang ada biaya operasional Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II mengalami penurunan ini mengidentifikasikan bahwa masih ada program Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang belum terlaksana.

Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis konsep pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran dengan memakai metode *value for money* di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengingat konteks di atas, pernyataan rumusan tentang masalah ini adalah bagaimanakah pengukuran kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja dengan memakai Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada masalah yang disebutkan di atas yakni untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja dengan memakai metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun keuntungan yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Melalui keahlian yang diperoleh peneliti di bangku kuliah, penelitian ini dapat meningkatkan pemahamannya dalam mengukur kinerja sektor publik.

2. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Sebagai saran yang bermanfaat bagi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Sungai Sumatera untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk memenuhi tujuan kantor pemerintah daerah.

3. Bagi Akademisi

Sebagai kerangka acuan dan sumber informasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan melalui penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II, peneliti yakin bahwa penelitian ini dapat memperdalam pemahaman pembaca tentang bagaimana Anggaran Belanja dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Dan Pengukuran Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Mahsun (2011) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran sejauh mana suatu kegiatan ataupun program sudah dilaksanakan dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategis perusahaan. Kata "kinerja" sering dipakai untuk menggambarkan kesuksesan ataupun tingkat pencapaian individu ataupun kelompok.

Bastian (2016) mengklaim bahwa kinerja adalah gambaran bagaimana suatu program dijalankan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, maksud, dan visi perusahaan. Pembuatan skema rencana organisasi mencakup daftar tujuan yang Anda miliki. Kinerja secara umum adalah prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi selama periode waktu tertentu yang harus didokumentasikan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi itu. Evaluasi ini mempertimbangkan baik keuntungan keluaran program ataupun masukannya.

Dalam *The Webster Dictionary*, kata "performance" memiliki tiga definisi yang berbeda, menurut Achmad S. Ruky (2008): (1) Performance adalah prestasi yang dipakai dalam konteks ataupun kalimat, misalnya tentang mobil yang sangat cepat (*high performance cars*): (2) Ungkapan "pertunjukan atau pertunjukan tarian rakyat" sering merujuk pada pertunjukan. tarian etnik, (3)

Melaksanakan tugas, seperti memakai ungkapan-ungkapan untuk melaksanakan kewajibannya, dikenal sebagai *performance his duties*.

Menurut pernyataan sebelumnya, jelas bahwa tingkat kinerja seorang karyawan dapat dinilai berdasarkan hasil kerja yang mereka hasilkan saat melaksanakan suatu tugas. Kinerja hanya dapat ditentukan jika individu ataupun kelompok memiliki kriteria keberhasilan itu berupa tujuan ataupun sasaran; jika tidak, dimungkinkan untuk menentukan kinerja tanpa tolok ukur.

2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Robertson dalam Mahsun (2011), Praktik menilai kemajuan kerja dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan disebut pengukuran kinerja. Ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: penggunaan sumber daya secara efektif dalam produksi barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa disampaikan kepada pelanggan yang puas); hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan yang dimaksudkan; serta efisiensi tindakan dalam meraih tujuan.

Sementara itu, Mahmudi (2018) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu teknik untuk mengukur derajat pencapaian organisasi. Derajat keberhasilan suatu organisasi dapat dimanfaatkan dalam konteks organisasi sektor publik untuk memperoleh legitimasi (pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat) dan dukungan publik. Masyarakat penerima layanan tentunya memberi evaluasi terhadap kinerja organisasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja didasarkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dasar yang dipakai untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja dimonitor secara sistematis dan pada level input dan output, serta keuntungan dan efek yang akan dihasilkan.

Akibatnya, pengukuran kinerja dapat berfungsi sebagai landasan yang masuk akal untuk pilihan dengan menilai kinerja yang sudah berlangsung selama jangka waktu tertentu dan memungkinkan perbandingan dengan periode waktu lainnya.

2.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut mahsun (2011) jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi:

1. Kelompok masukan (*input*)

adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan untuk melanjutkan dan mencapai hasil. Indikator ini menghitung berapa banyak sumber daya, termasuk anggaran (dana), personel, alat, perlengkapan, dan masukan lainnya, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. dengan memeriksa bagaimana sumber daya yang dimiliki dialokasikan berdasarkan rencana strategis yang sudah dipraktikkan. Tolok ukur ini juga dapat dipakai untuk menilai seberapa baik perbandingannya dengan organisasi terkait.

2. Kelompok proses (*process*)

Indikator proses organisasi menentukan skala kegiatan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan tingkat ketepatan pelaksanaannya. Tingkat efisiensi ekonomi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi adalah indikator proses yang paling penting. Efisiensi mengacu pada kuantitas output yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kuantitas input, sedangkan ekonomis mengacu pada biaya ataupun durasi suatu kegiatan yang kurang dari biasanya.

3. Kelompok keluaran (*output*)

Apakah segala sesuatu diantisipasi untuk dicapai langsung dari suatu tindakan, apakah itu materi ataupun tidak berwujud. Dengan membandingkan keluaran dari berbagai lembaga, indikator ataupun ukuran tingkat keluaran dipakai untuk menghitung hasil dari suatu kegiatan dan menentukan apakah hasil itu dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Jika tolok ukur dihubungkan dengan tujuan kegiatan yang jelas dan terukur, indikator keluaran berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan.

4. Indikator hasil (*outcomes*)

Segala sesuatu yang berdampak langsung pada bagaimana suatu kegiatan berfungsi dalam jangka menengah tercermin dalam keluarannya. Mengukur indikator hasil lebih penting daripada produksi saja. Terlepas dari kenyataan bahwa produk sudah diproduksi secara efektif, tidak pasti apakah tujuan kegiatan sudah terpenuhi. Tingkat pencapaian hasil yang lebih

tinggi, yang mungkin mencakup beberapa mitra, dijelaskan oleh hasil. Organisasi akan dapat menentukan dengan memakai indikator outcome apakah outcome yang sudah diperoleh berupa output benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai output dan memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

5. Indikator manfaat (*Benefit*)

Apakah segala sesuatu terhubung dengan tujuan keseluruhan dari pelaksanaan tugas. Keuntungan yang sudah dicapai sebagai hasil dari indikator hasil dijelaskan oleh indikator manfaat. Keuntungan ini tidak akan langsung muncul begitu saja, terutama dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menguraikan tugas-tugas yang harus dilakukan dan beroperasi dengan baik (lokasi dan waktu yang tepat). Indikator dampak adalah dampak positif dan negatif.

2.3 Siklus Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2016), terdapat berbagai siklus pengukuran kinerja yakni:

1. Perencanaan Strategik

Proses perencanaan strategis, yang berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional, dan kegiatan, menjadi yang pertama dalam siklus penilaian kinerja.

2. Penetapan Indikator Kerja

Instansi ataupun bisnis harus menyusun dan menetapkan ukuran indikator kerja mengikuti perumusan strategi.

3. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja

Latihan ini terdiri dari tiga tugas terpisah. Sebelum melangkah lebih jauh, ia harus memastikan bahwa ia memiliki data yang diperlukan dan mengikuti siklus penilaian kinerja. Pengumpulan data diperlukan untuk evaluasi kinerja. Ketiga, manfaatkan data pengukuran kinerja yang diperoleh, yang harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami.

4. Penyempurnaan Ukuran

Pada titik ini, mempertimbangkan indikator hasil dan indikator dampak lebih diutamakan daripada mempertimbangkan indikator input dan output.

5. Pengintegrasian dengan proses manajemen.

Kesulitan berikutnya adalah menggabungkan penilaian kinerja dengan proses manajemen sesudah metrik kerja tersedia.

Gambar 2.1 Siklus Pengukuran Kinerja



Sumber: Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar

2.4 Manfaat dan Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

2.4.1 Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2012) mengklaim bahwa keunggulan penilaian kinerja antara lain:

1. Berikan penjelasan tentang metode yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja.
2. Memberi arahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Untuk melacak dan menilai hasil kinerja, membandingkannya dengan sasaran kinerja, dan mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan standar.
4. Sebagai landasan untuk menentukan reward dan punishment atas kinerja secara objektif yang ditetapkan sejalan dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan membina komunikasi antara pemimpin dan pengikut.
6. Membantu menentukan apakah kebutuhan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu pemahaman tentang bagaimana entitas pemerintah beroperasi.
8. Memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif.

2.4.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2012), tujuan sistem pengukuran kinerja yakni:

1. Untuk lebih menyampaikan rencana (top down dan bottom up).
2. Menilai keuangan dan kinerja keuangan secara wajar untuk melacak perkembangan pelaksanaan rencana.

3. Untuk mendorong tercapainya keselarasan yang sangat baik dan mempertimbangkan tujuan manajer tingkat menengah.
4. Sebagai sarana untuk mencapai kepuasan berdasarkan strategi pribadi dan kompetensi logis kelompok

2.5 Prinsip-Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja

Menurut Bastian (2016), pemilihan ukuran kinerja untuk instansi dan perusahaan mempertimbangkan prinsip-prinsip yakni:

1. Tentukan ukurannya sekali lagi. Tindakan yang diperiksa secara rutin, jika tidak lagi relevan, maka alasan terkait kenyamanan manajemen perlu disebutkan
2. Mengukur tindakan spesifik, bukan sekadar hasil akhir, adalah penting.
3. Menilai efektifitas motivasi tim kerja untuk mencapai tujuan.
4. Tata cara pengukuran merupakan alat yang tergabung.
5. Pengukuran harus berpusat pada akuntabilitas publik. Perbandingan kinerja antara unit-unit seperti visi, departemen, kelompok, dan orang selama bertahun-tahun merupakan pengukuran internal yang khas.

2.6 Metode *Value For Money* 3E (Efektif, Efisien, dan Efisiensi)

2.6.1 Pengertian *Value For Money*

Worth for money, yang didefinisikan oleh Mahmudi (2014) sebagai penghargaan terhadap nilai uang, merupakan gagasan kunci dalam organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2014), value for money merupakan konsep manajemen bagi perusahaan di sektor publik yang didasarkan pada tiga faktor

utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Harapan masyarakat untuk nilai uang termasuk menjadi ekonomis (hemat) dalam alokasi sumber daya dan pengadaan, efisien (efektif) dalam arti meminimalkan penggunaan ataupun pengorbanan sambil memaksimalkan hasil, dan efektif (efektif) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.6.2 Konsep Umum 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi)

Gagasan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis), yang menggabungkan penelitian tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, berfungsi sebagai standar dalam anggaran organisasi untuk organisasi berorientasi laba (sektor swasta) dan organisasi nirlaba (sektor publik).

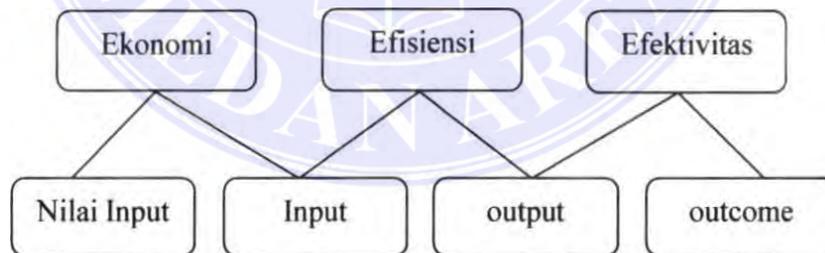
Efektivitas diukur dengan sejauh mana tujuan program terpenuhi, ataupun dengan rasio produksi terhadap hasil. Komponen utama VFM adalah tiga hal ini, dengan memasukkan ekuitas dan pemerataan ataupun kesetaraan sebagai komponen tambahan. Keadilan adalah adanya kemungkinan sosial yang setara untuk mendapatkan layanan publik berkualitas tinggi dan keamanan finansial. Selain keadilan, diperlukan pemerataan (equality). Dana publik harus dipakai secara merata di antara semua kelompok, bukan hanya untuk kepentingan tertentu.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin dengan input yang diberikan ataupun memanfaatkan input dalam jumlah sesedikit mungkin untuk menghasilkan output ataupun input yang diperlukan untuk memenuhi kriteria ataupun tujuan kinerja yang sudah ditetapkan.

Ekonomi adalah proses mendapatkan input (masukan) dengan biaya terendah dengan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas tertentu. Ekonomi adalah perbandingan nilai input dengan nilai aktual input (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan seberapa banyak organisasi sektor publik dapat meminimalisir jumlah sumber daya yang dikonsumsi dengan meminimalisir pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

Sederhananya Salah satu elemen organisasi kunci untuk anggaran organisasi sektor publik adalah efisiensi dan efektivitas untuk memberi layanan dan kesejahteraan yang maksimal. Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menunjukkan pencapaian tingkat pelayanan dengan biaya serendah mungkin (economic cost). Sebab biaya terendah belum tentu yang terbaik, biaya unit terendah tidak selalu mewakili nilai uang 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) terbesar.

Efektif, Efisien, dan Ekonomis (ataupun 3E) dapat dikonseptualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Konsep 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi)

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2012)

1. *Input* merupakan sumber daya yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan..
2. *Output* adalah hasil ataupun nilai tambah yang dihasilkan oleh kebijakan, inisiatif, dan aktivitas.

3. Sasaran antara (*throughput*), analisis *value for money* 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi) menuntut data input dan output yang baik sebab pengukuran input dan output sangat erat kaitannya dengan gagasan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Jika data keluaran riil tidak dapat diakses, tujuan antara dapat dipakai sebagai alat pengukuran.
4. *Outcome* merupakan hasil dari tindakan tertentu. Menentukan dan mengukur hasil terkadang lebih menantang daripada melaksanakannya untuk input dan output.

Jika suatu perusahaan memakai biaya input yang paling rendah untuk menghasilkan output yang terbaik guna memenuhi tujuan organisasi, maka gagasan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dapat diwujudkan. Implementasi gagasan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dianggap mampu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.

2.6.3 Manfaat Konsep 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi)

Bagi pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat, prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) sangat penting sebab dengan demikian akan menghasilkan keuntungan seperti (Halim dalam Mahsun, 2016):

1. Membuat pelayanan publik lebih efektif dalam artian disampaikan sebagaimana dimaksud.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
3. Menurunkan harga pelayanan publik dengan memakai sumber daya secara lebih efektif dan hemat.
4. Alokasi dana yang lebih difokuskan pada kesejahteraan umum.

5. Meningkatkan kesadaran akan peran dana publik dalam membangun akuntabilitas publik.

2.7 Teknik Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2016), Di antara teknik untuk mengukur kinerja, salah satunya memakai ide 3E (Efektif, Efisien, Ekonomi).

2.7.1 Ekonomis

Menurut Mahmudi (2013), perekonomian berkaitan dengan proses pengubahan input primer berupa sumber keuangan (uang/tunai) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal yang dipakai dalam perekonomian. berjalannya organisasi. Gagasan ekonomi terkait erat dengan konsep biaya untuk mendapatkan satu unit input.

Hemat (hemat) adalah hemat, yang juga menyangkut pengelolaan yang bijaksana ataupun hati-hati (prudence), dan tidak ada pemborosan suatu kegiatan operasional yang dianggap hemat jika dapat menghilangkan ataupun meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Berikut adalah rumus yang dapat dipakai untuk mengukur derajat kegiatan ekonomi:

Tingkat Ekonomi:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomi adalah:

1. Apabila didapatkan nilai $x < 100\%$ ($x < 100\%$) artinya ekonomis.
2. Apabila didapatkan nilai $x = 100\%$ artinya ekonomis berimbang.

3. Apabila didapatkan nilai $x > 100\%$ artinya tidak ekonomis

2.7.2 Efisiensi

Efisiensi, menurut Mahmudi (2013), berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk dibandingkan dengan output itu sendiri. Efisiensi didefinisikan secara sistematis sebagai rasio output terhadap input, ataupun output per unit input. Ketika suatu organisasi, program, ataupun kegiatan mampu memberi output tertentu dengan input potensial minimum ataupun ketika input tertentu dapat menghasilkan output maksimum, dikatakan efisien (belanja dengan baik).

Efisiensi dan gagasan produktivitas saling terkait erat. Dengan memakai perbandingan antara hasil yang dihasilkan dan input yang dipakai, efisiensi (efficacy) diukur (cash of output). Jika output ataupun hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan keuangan yang paling sedikit, maka kegiatan operasional dapat dikatakan efisien (belanja dengan baik). Rumus untuk menghitung derajat efisiensi adalah sebagai berikut:

Tingkat efisiensi:

Kriteria	Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan	x 100%
	Anggaran Pendapatan	

efisiensi adalah:

1. Apabila didapatkan nilai $x < 100\%$ artinya efesien.
2. Apabila didapatkan nilai $x = 100\%$ artinya efesiensi berimbang.
3. Apabila didapatkan nilai $x > 100\%$ artinya tidak efesien.

2.7.3 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2013), korelasi antara hasil yang diantisipasi dan aktual adalah yang menentukan efikasi. Efektivitas adalah hubungan antara produksi dan hasilnya. Efektivitas organisasi, program, ataupun kegiatan berkorelasi terbalik dengan kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas berfokus pada hasil, sedangkan efisiensi berkonsentrasi pada proses ataupun output dan ekonomi pada input. Suatu organisasi, program, ataupun kegiatan dianggap berhasil jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (belanja dengan bijak).

Sasaran ataupun tujuan yang harus dicapai berkaitan dengan efektivitas. Apabila rangkaian kegiatan mencapai maksud dan tujuan kebijakan, maka dinyatakan kegiatan operasional itu efektif (belanja secara bijaksana). Berikut adalah rumus untuk menghitung efikasi.

Tingkat Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas adalah:

1. Apabila didapatkan nilai $x < 100\%$ artinya tidak efektif.
2. Apabila didapatkan nilai $x = 100\%$ artinya efektivitas berimbang.
3. Apabila didapatkan nilai $x > 100\%$ artinya efektif

2.8 Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah perencanaan keuangan masa depan yang biasanya berlangsung selama satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2013). Anggaran sektor publik, yakni yang termasuk dalam APBN dan APBD, memuat proyeksi keuangan ke depan mengenai besaran pendapatan, belanja, surplus ataupun defisit, pembiayaan, serta program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2018).

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2013), Anggaran publik, berisi rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk rencana kegiatan, rencana pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter, dan berisi perkiraan tentang apa yang harus dicapai ataupun dilakukan selama beberapa periode mendatang. Dengan kata lain, anggaran adalah rencana keuangan yang menyatakan:

1. Berapa biaya perencanaan yang dibuat? (beban ataupun pendapatan).
2. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membiayai strategi dan bagaimana memperolehnya.

Pemahaman sebelumnya membuat sangat jelas bahwa anggaran untuk (pemerintah) lebih diutamakan daripada perencanaan pengeluaran untuk sumber pendapatan baru. Hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan yang justru mengutamakan perencanaan pengeluaran untuk sumber pendapatan baru. Perbedaan ini muncul sebab organisasi yang tidak mencari keuntungan, seperti pemerintah, lebih mengutamakan penggunaan keuangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. masih dipertimbangkan.

Meskipun benar bahwa tujuan utama bisnis adalah menghasilkan laba, penggunaan laba harus benar-benar dihitung dengan memakai untung dan rugi

untuk memastikan bahwa pendapatan yang diantisipasi setinggi mungkin dan biaya diminimalkan hingga semaksimal mungkin dengan harapan bahwa ini akan menghasilkan keuntungan.

2.9 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Muindro Renyowijoyo, konsep akuntansi di sektor publik adalah sebagai berikut: (2012). "Akuntansi di sektor publik" mengacu pada sistem akuntansi khusus yang dipakai oleh lembaga publik sebagai metode untuk memberi akuntabilitas kepada masyarakat umum. Saat ini, semakin berkembang fokus pada prosedur akuntansi yang dilakukan oleh lembaga publik. Ini termasuk akuntansi yang dilakukan oleh sektor publik dan organisasi non-pemerintah publik. Masyarakat mengharapkan lembaga-lembaga publik dikelola dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab, dan mereka menuntut hal ini dari organisasi-organisasi itu.

Ada banyak tekanan pada organisasi di sektor publik untuk menjadi lebih efisien, dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan, baik ekonomi ataupun sosial, yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka terhadap publik serta dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Sebab kebutuhan ini, akuntansi sudah diakui sebagai disiplin ilmu yang sangat penting untuk pengelolaan urusan publik. Ketika pertama kali dikembangkan, akuntansi untuk sektor publik merupakan pekerjaan yang sangat terspesialisasi berdasarkan metode yang sangat sederhana. Proses menjadi disiplin yang lebih esensial kini dilakukan di sektor publik sebagai bagian dari proses ini.

2.9.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi di sektor publik terkait erat dengan praktik akuntansi di ranah publik, baik dari segi penerapannya ataupun perlakuannya. Jika dibandingkan dengan sektor swasta dan komersial, area publik itu sendiri mencakup wilayah geografis dan populasi yang lebih besar daripada yang terakhir.

Secara kelembagaan, sektor publik terdiri dari organisasi nirlaba non-pemerintah dan organisasi nirlaba non-pemerintah. Organisasi di dalam pemerintahan dikenal dengan nama instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja pemerintah lainnya seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan sebagainya).

Akuntansi pemerintah, di sisi lain, berkaitan dengan bidang keuangan negara, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan, termasuk analisis konsekuensi yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2015).

Ada juga entitas nirlaba yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintah. Badan-badan ini berspesialisasi dalam tantangan pelaporan transaksi dari unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyediakan laporan akuntansi yang berguna mengenai aspek-aspek pengelolaan administrasi pemerintahan dan membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, akuntansi pemerintah ada untuk membantu manajemen dalam memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sadeli, 2015).

Sebagaimana disyaratkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintahan Daerah, sistem akuntansi yang dipakai oleh instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga, dan Pemerintah Daerah) harus mematuhi standar pemerintah (SAP).

2.10 Laporan Realisasi Anggaran

2.10.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan data realisasi dan anggaran suatu organisasi pelapor secara bersamaan untuk periode tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LRA memberi gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang ditangani oleh pemerintah pusat ataupun daerah dan menunjukkan perbandingan antara anggaran dan aktualisasinya dalam periode pelaporan tertentu. Laporan realisasi anggaran menurut Siregar (2015) adalah dokumen yang merangkum sumber, penyaluran, dan penggunaan sumber daya keuangan yang sudah dikuasai pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan sangat penting saat membuat anggaran. Tapi itu membuatnya sangat jelas apa yang akan dilakukan ke depan.

2.10.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dibuat dengan maksud untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan keuangannya, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, mendorong efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik, serta memungkinkan pemerintah membelanjakan uang sesuai dengan pengeluarannya.

2.10.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Keuntungan membuat laporan realisasi antara lain dapat membandingkan realisasi setiap pos dengan anggarannya dalam satu periode, termasuk data pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus, dan pembiayaan. Pengguna laporan dapat memakai data ini untuk menilai pilihan yang dibuat sehubungan dengan alokasi sumber daya keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelapor terhadap anggaran.

Dengan menyampaikan penilaian perbandingan, laporan realisasi anggaran membantu memperkirakan sumber daya keuangan yang akan diperoleh untuk mendukung operasional pemerintah pusat dan daerah pada periode mendatang.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Indah Sari Rahmawati, Nur Handayani . Vol.8 No.11, (2019)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Memakai Prinsip <i>Value For Money</i> .	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian dilakukan pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i> .	Hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014-2018 jika dihitung memakai metode <i>value for money</i> pada tingkat ekonomis cenderung tidak stabil tetapi ekonomis sebab menghasilkan rasio kurang dari 100%. Kinerjanya dapat dinilai sudah efisien sebab tingkat efisiensinya memperlihatkan kurang dari 100%. Dan kinerjanya dapat dikatakan cenderung tidak stabil tapi kemudian mengalami kenaikan 5% menjadi 105% pada tahun 2018 hingga dapat dikatakan efektif.
2.	Immanuel R.A. Polii, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuma	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Provinsi	Hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2017 jika diukur dengan memakai metode <i>value for money</i> kinerjanya dinilai ekonomis sebab berhasil

	n Vol.8 No.4, (2020)	Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> .	Sulawesi Utara sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i> .	meminimalisir pengeluaran yang boros. Kinerjanya dinilai cukup efektif dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2017 Pemprov Sulut dapat dikatakan efektif sebab mampu mencapai rasio 100,22%. Kinerjanya dinilai efisien sebab mampu memakai sumber daya yang diperlukan sesedikit mungkin untuk mencapai target yang maksimal dan berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanja.
3.	C.Susi Maryant; Agus Munandar Vol.5 No.3, (2021)	Analisis <i>value for money</i> untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2015-2019	Pemerintah Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Daerah Kota Surabaya sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II.	Hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015-2019 jika dihitung memakai metode <i>value for money</i> pada aspek ekonomis cukup ekonomis, Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata selama lima tahun dinilai tidak efisien dari segi efisiensi sebab pemerintah daerah tidak mampu mencapai tujuan efisiensi, yakni penggunaan sumber daya yang

			Persamaan terhadap penelitian sebelumnya sama-sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i> .	minimal untuk dampak yang terbesar. Dan itu termasuk dalam kelompok yang sangat efektif dalam hal kemandirian rata-rata selama periode lima tahun dan mampu merealisasikan program sesuai harapan.
4.	Purwiyanti .Dwi Vol.5 No.3, (2017)	ANALISIS KINERJA BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY PADA KEGIATAN FISIK PEKERJAN AN IRIGASI	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama	Temuan berikut dapat diambil dari studi tentang seberapa baik kegiatan fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi dilakukan. 1. Dari segi rasio ekonomi, kegiatan fisik Tugas Irigasi Kodi Donggala pada tahun 2014 mampu menyelesaikan pekerjaan dengan harga terjangkau. 2. Kegiatan Pekerjaan Irigasi Fisik Kodi Donggala Tahun 2014 sudah dapat berfungsi efektif ditinjau dari rasio efisiensi. 3. Kegiatan Tugas Fisik Pengairan Kodi

		DONGGA LA KODI (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i>	Donggala Tahun 2014 sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya secara efisien, sesuai dengan rasio efektifitas.
5.	Ardani, Rayfaneld a Rachmand ika Vol.5 No.3, (2017)	ANALISI S VALUE FOR MONEY PENGEL OLAAN DANA DESA BIDANG KESEHA TAN DES A ALAS MALANG	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Alas Malang	penelitian ini adalah pengukuran kinerja dengan value for money untuk pengelolaan dana desa bidang kesehatan (PKD) di Desa Alas Malang sudah Ekonomis, Efisien, cukup Efektif. Hal ini terjadi sebab, meski ada batasan yang diberlakukan oleh pandemi covid-19, upaya tetap dilakukan untuk bisa mengeksekusinya. Dari penggunaan dana alokasi itu terlihat jelas bahwa dana itu dimanfaatkan dengan baik untuk melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya.
6.	Hatta, Zulhelmy Vol.1 No.1, (2021)	Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabili	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan: kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan

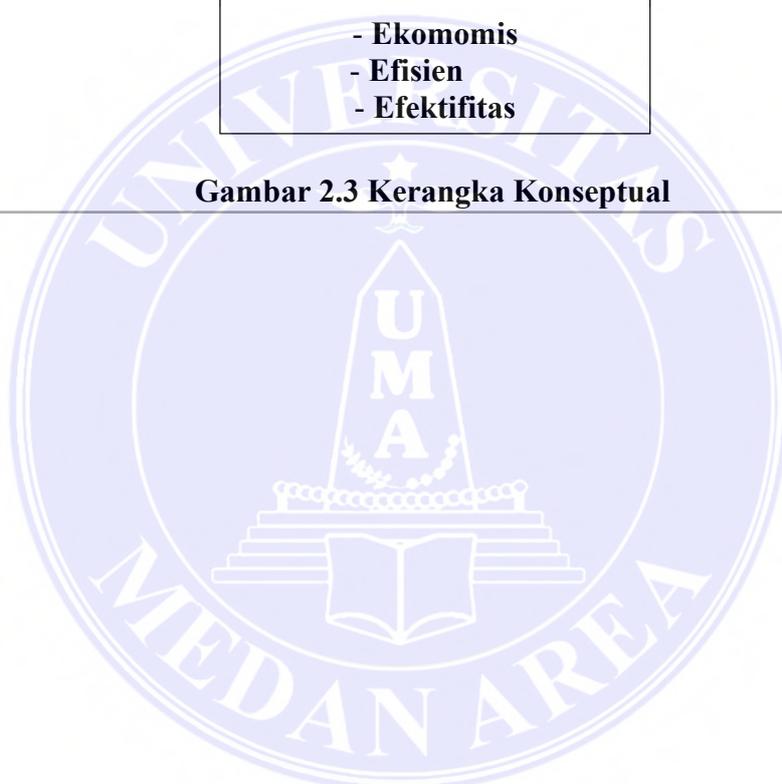
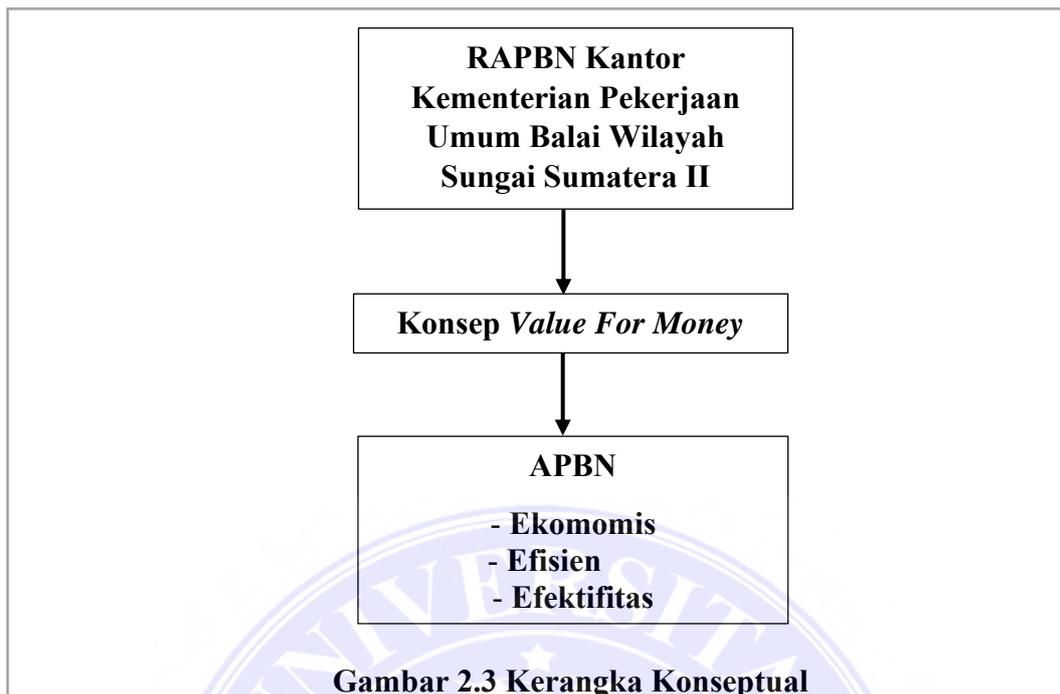
		<p>tas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau</p>	<p>Pendidikan Provinsi Riau sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i>.</p>	<p>Menengah tahun 2018-2019, Seperti terjangkau, cukup efektif, dan kurang efektif. Kinerja keuangan Program Pendidikan Manajemen Layanan Pendidikan Tahun 2018–2019 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dinilai ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Kinerja keuangan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018–19 dinilai ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Value for money belum tercapai oleh kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.</p>
7.	<p>Polii. A.R. Immanuel Vol. 8 No.4, (2020)</p>	<p>ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti dengan konsep <i>Value For Money</i>.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni: 1. Rasio ekonomi dari tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai ekonomis, sebab menghasilkan rasio rata-rata 107,37% yakni lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Sulut sudah mengelola penggunaan</p>

		UTARA BERDAS ARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY		<p>anggaran dengan baik dan dapat meminimalisir jumlah sumber daya yang dikonsumsi dengan meminimalisir pengeluaran yang berlebihan. 2. Rasio efisiensi rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sejumlah 99,85%, menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tergolong efisien. Hasil perhitungan rasio yang dicapai berkisar antara 90% sampai dengan 99%. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memakai sumber daya yang paling sedikit untuk mencapai tujuan terbesar dan berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi pengeluaran. 3. Rata-rata hasil perhitungan yang dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sejumlah 98,35%, menunjukkan kinerja yang tergolong sangat berhasil. Sebab hasil perhitungan rasio yang dicapai antara 85% sampai dengan 99%, Pemprov Sulut dianggap sangat berhasil dalam</p>
--	--	-------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan tujuan anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun pemerintah sudah berupaya untuk bekerja lebih efektif dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efektivitas yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan mencapai rasio 100,22% pada tahun 2017, hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tergolong efektif.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori terhubung ke berbagai aspek yang dianggap sebagai kesulitan kritis, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019). Landasan teoretis dari penyelidikan ini dapat dipecah menjadi kategori berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif dipakai dalam penelitian ini. Tanpa melaksanakan perbandingan ataupun menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel independen, baik satu ataupun beberapa variabel (Sugiono, 2016). Penelitian deskriptif, menurut Ali Maksim (2012), adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis.

Tujuan utama analisis tersebut adalah untuk memberikan gambaran ilustrasi dan/atau ringkasan yang dapat membantu pembaca memahami jenis variable dan keterkaitannya. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran dari Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Realisainya Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II, yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H.

Nasution No.30, Pangkalan Mansyur, Kec. No Telp: (061) 7861522, Website:
sda.pu.go.id.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022-April 2023.

Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan dapat dilihat pada tabel

3.1 berikut dibawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022							
		Jan- Maret	Apr- Juni	Juli- Agst	Sept- okt	Nov	Des	Jan	April
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengolahan Data								
7	Bimbingan Hasil								
8	Seminar Hasil								
9	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.2 Populasi

Menurut Sugiono (2016), Populasi adalah area umum yang terdiri dari hal-hal ataupun orang dengan atribut dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan dari mana kesimpulan kemudian dibuat. Dalam studi ini, populasinya adalah data anggaran belanja dan data realisasi anggaran belanja pada tahun 2019-2021.

3.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2016), Sampel adalah sebagian dari populasi, yang menjadi dasar data yang dipakai dalam penelitian dan terdiri dari berbagai karakteristik. Semua populasi dijadikan sampel penelitian dalam penelitian ini sebab merupakan sampel jenuh (*probability sampling*).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Deskripsi variabel yang menjelaskan apa artinya ataupun menggambarkan bagaimana suatu kegiatan tersebut.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengukuran kinerja keuangan dengan metode <i>value for money</i>	prosedur yang dipakai untuk mengevaluasi seberapa baik pekerjaan dilakukan dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya memakai alat yang mengukur	Konsep 3E: 1. Ekonomis, perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran (<100%) 2. Efisiensi, perbandingan realisasi anggaran untuk

	tingkat ekonomi, efisien, dan efektif. Erawaan, A. 2018)	memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan (<100%) 3. Efektivitas, perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan (>100%)
Anggaran Belanja Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II.	Suatu rencana kerja yang dibuat dan dipakai oleh Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Erawaan, A. (2018)	Anggaran belanja dan realisasi anggaran pada periode 2019-2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis penelitian sebagai berikut:

Data yang berbentuk angka ataupun bilangan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dapat ditangani ataupun diperiksa memakai metode perhitungan matematis ataupun statistik tergantung pada jenisnya. berdasarkan prosedur ataupun cara memperolehnya.

Jenis data dalam penelitian ini berupa Data Anggaran dan data Realisasi Anggaran Belanja dengan Memakai metode *Value For Money* Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

3.5.2 Sumber Data

Data sekunder dipakai dalam penyelidikan ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada

(peneliti sebagai tangan kedua) atau data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi.

Laporan anggaran dan laporan realisasi belanja menjadi sumber data penelitian ini pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II tahun 2019-2021.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi dokumentasi adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Sugiyono (2018) mendefinisikan teknik dokumentasi sebagai metodologi yang dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar untuk membuat laporan dan informasi yang dapat membantu studi. Dengan mengumpulkan sumber berupa dokumen dan arsip dari Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai II, peneliti dalam penelitian ini memperkuat data. dan data lainnya berupa Laporan Realisasi Rincian Biaya Operasional, Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, dan Laporan Anggaran Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai II.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kuantitatif adalah metode yang dipakai untuk analisis data. Pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah analisis data dengan meringkas ataupun menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa bertujuan untuk menarik generalisasi yang luas.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Memakai Metode Value For Money Pada Kantor Kemeterian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan adalah bahwa kinerja Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Sungai Sumatera II ditinjau dari anggaran belanja tahun 2019-2021 bila diukur dengan memakai 3E (value for uang) metode tidak optimal ataupun baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Ekonomis

Berdasarkan tingkat ekonomi realisasi belanja tahun 2019, tingkat belanja pegawai sejumlah 108,53% yang menunjukkan tidak ekonomis. Tingkat belanja barang dan jasa sejumlah 97,35% yang menunjukkan ekonomis. Selain itu, tingkat belanja modal memiliki tingkat pencapaian sejumlah 98,41% yang menunjukkan sudah ekonomis. Pada tahun 2020, belanja pegawai sejumlah 101,21% tidak ekonomis, sedangkan belanja barang dan jasa sejumlah 85,43% dan belanja modal juga ekonomis sejumlah 97,50%. Namun pada tahun 2021, belanja pegawai baru mencapai 90,08%, sedangkan belanja barang dan jasa sudah ekonomis sejumlah 82,31%, dan belanja modal sudah ekonomis sejumlah 97,60%. Pada realisasi belanja tahun 2019 dan 2020 untuk belanja pegawai, Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum tidak ekonomis sebab realisasinya melebihi 100%; namun pada tahun 2020 sudah ekonomis sebab realisasinya

kurang dari 100%; dan belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun 2019-2021 sangat ekonomis sebab realisasinya kurang dari 100%. Artinya, realisasi belanja tahun 2019 dan 2020 untuk belanja pegawai tidak akan ekonomis hingga tahun 2020.

Menurut penjelasan Bagian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, penyebab tidak tercapainya tingkat keekonomian, khususnya dalam anggaran belanja pegawai, adalah sebab penambahan anggaran belanja pegawai karyawan selama tahun berjalan. Hal ini terutama berlaku untuk anggaran belanja pegawai.

2. Efisiensi

Pada tahun 2019, Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pusat Wilayah Sungai Sumatera II memiliki tingkat efisiensi sejumlah 34,17%, pada tahun 2020 sejumlah 28,73%, dan pada tahun 2021 sejumlah 41,20%. Angka-angka ini didasarkan pada persentase. Jadi berdasarkan persentase diatas selama tiga tahun kinerja Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II efisien sebab realisasinya kurang dari 100%.

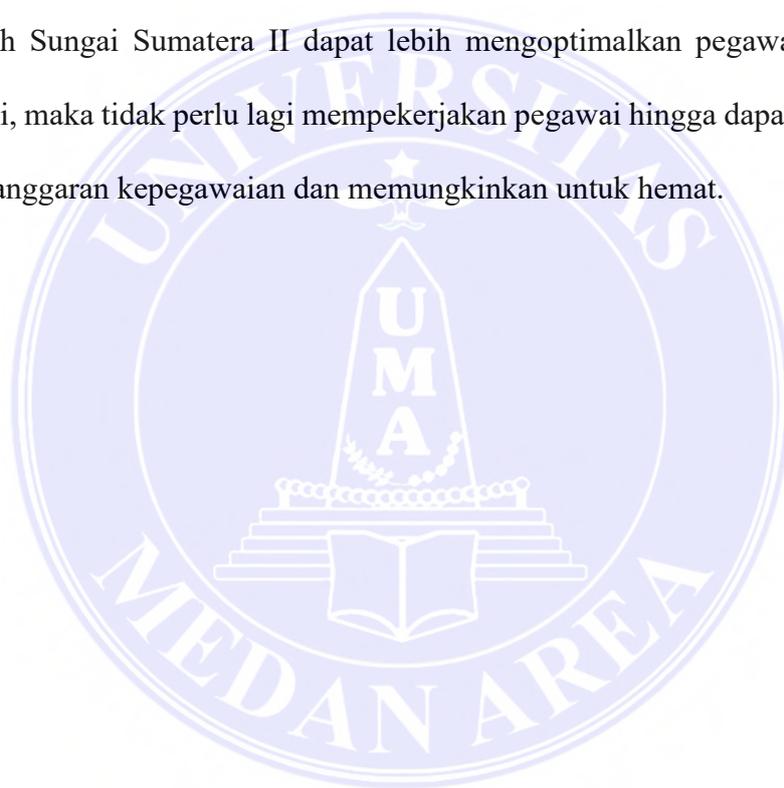
3. Efektivitas

Menurut kriteria efektivitas, pendapatan harus lebih dari 100% agar dianggap efektif, namun jika tidak mencapai 100%, maka tidak dapat dianggap efektif. Lihatlah proporsi yang melebihi jumlah pendapatan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada tahun 2019-2021 efektif sebab persentasenya mencapai 100%.

5.2 SARAN

Dari hasil temuan yang sudah dipaparkan pada kesimpulan sebelumnya, ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pusat Wilayah Sungai II Sumatera II sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jangka panjang tindakan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh lembaga, dan ini termasuk yang berikut:

Jika Dinas Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum di Kantor Wilayah Sungai Sumatera II dapat lebih mengoptimalkan pegawai yang sudah dimiliki, maka tidak perlu lagi mempekerjakan pegawai hingga dapat meringankan beban anggaran kepegawaian dan memungkinkan untuk hemat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S, Ruky. (2008). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Fadri, H. (2017). *Analisis Kinerja Karyawan Pada PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang*, 4(1), Riau.
- Hutabarat. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama, Banten.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta.
- Mahsun. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2018). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YPKN, Yogyakarta.
- Maryanti S, C & Munandar A. (2021). *Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019*, 5(3), Surabaya.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta.
- Masdiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nana S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahmawati, S. I. (2019). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Memakai Prinsip Value For Money*, 8(1), Jawa Timur.
- Renyowijoyo M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sarapi dkk. (2022). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Memakai Metode Economic Value Added (EVA) Dan Financial Value Added (FVA) Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2018-2020*, 5(2), 399-406, Manado.
- Sadeli, L. M. (2015). *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta.
- Salim, Haidir, (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiono, (2004). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Erlangga, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Ulimpa dkk. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat*, 13(4), 302-307, Papua Barat.





DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dan Data Realisasi Biaya Operasional Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**

JL. JEND. BESAR DR. A. H. NASUTION NO. 30 PKJ. MASYHUR TELP. (061) 7861522 - 7861533 FAX. (061) 7861485 KODE POS 20143 MEDAN

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Tahun Anggaran 2019-2021**

(dalam satuan rupiah)

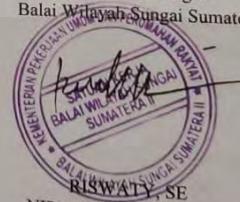
No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	88.440.000.000	91.250.202.000
2.	2020	87.000.000.000	87.770.000.000
3.	2021	86.000.000.000	86.250.202.000
	TOTAL	261.440.000.000	265.270.404.000

**Rincian Realisasi Biaya Operasional Kantor Kementerian PU Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Tahun Anggaran 2019-2021**

(dalam satuan rupiah)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	40.220.000.000	30.220.000.000
2.	2020	30.000.000.000	25.000.000.000
3.	2021	42.440.000.000	35.440.000.000
	TOTAL	112.660.000.000	90.660.000.000

Medan, 12 Desember 2021
Kepala Keuangan
Balai Wilayah Sungai Sumatera II


RISWATY, SE
 NIP.19691112007012000

2. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

a. Tahun 2019

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**
Jl. Jend. Besar Djuanda No. 30 Pekanbaru, Riau. Telp. (061) 760372 - 760353 Fax. (061) 760353000 - 7603043 MEDAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
TAHUN ANGGARAN 2019**

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019
A	Pendapatan	88.440.000.000
B	Belanja Pegawai	3.409.374.000
1	Layanan perkantoran	3.409.374.000
2	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	
C	Belanja Barang dan Jasa	27.504.568.000
1	Dukungan manajemen BBWS/BWS	15.892.488.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	
3	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan ingasi permukaan, rawa, dan tambak	3.909.891.000
4	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	69.188.000
5	Layanan teknis SDA	
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	7.442.661.000
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	136.920.000
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	53.420.000
D	Belanja Modal	37.200.598.000
1	Dukungan Manajemen BBWS/BWS	3.578.000.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	
3	Layanan teknis SDA	
4	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan ingasi permukaan, rawa dan tambak	18.593.338.000
5	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	2.825.782.000
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	958.600.000
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	9.596.163.000
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	1.648.715.000

Medan, 12 Desember 2019
Kepala Keuangan
Balai Wilayah Sungai Sumatera II


R. SWATY, SE
NIP. 196911112007042000

b. Tahun 2020

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**
JL. JEND. BESAR DR. A. H. NASUTION NO. 30 POKJ. ALASYUR, TELP. (061) 7861522 - 7861533 FAX. (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020
A	Pendapatan	87.000.000.000
B	Belanja Pegawai	3.000.000.000
1	Layanan perkantoran	3.000.000.000
2	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	
C	Belanja Barang dan Jasa	21.287.101.000
1	Dukungan manajemen BBWS/BWS	14.568.547.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	
3	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan, rawa, dan tambak	2.655.408.000
4	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	
5	Layanan teknis SDA	
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	3.960.666.000
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	30.480.000
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	52.000.000
D	Belanja Modal	25.371.581.000
1	Dukungan Manajemen BBWS/BWS	3.893.331.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	
3	Layanan teknis SDA	
4	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak	6.841.764.000
5	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	1.774.758.000
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	7.078.530.000
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	5.783.198.000

Medan, 12 November 2020
Kepala Keuangan
Balai Wilayah Sungai Sumatera II


BISWATY, SE
NIP.196911112007012000

c. Tahun 2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Jl. Jend. Besar Dra. H. Nasution No. 3001, Medan, Sumatera Utara. Telp. (061) 7861522 - 7861531 Fax. (061) 7861495 Kode Pos 20143 Medan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021
A	Pendapatan	86.000.000.000
B	Belanja Pegawai	3.000.000.000
1	Layanan perkantoran	
2	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	3.000.000.000
C	Belanja Barang dan Jasa	27.918.328.000
1	Dukungan manajemen BBWS/BWS	19.493.118.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	2.967.970.000
3	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi Permukaan, rawa, dan tambak	2.509.581.000
4	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	
5	Layanan teknis SDA	2.252.162.000
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	639.754.000
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	55.743.000
D	Belanja Modal	9.837.084.000
1	Dukungan Manajemen BBWS/BWS	4.117.076.000
2	Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	258.040.000
3	Layanan teknis SDA	1.209.180.000
4	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak	114.168.000
5	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	
6	Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu	
7	Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya	
8	Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	4.138.620.000

Medan, 24 Desember 2021
Kepala Keuangan
Balai Wilayah Sungai Sumatera II


RISWATY SE
NIP. 196911112007012000

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II (2019-2021)

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
TAHUN ANGGARAN (2019-2021)**

(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
A	Pendapatan	81.250.202.000	87.770.000.000	86.250.202.000
B	Belanja Pegawai	3.700.374.000	3.036.413.000	3.002.647.000
1	Belanja uang makan PNS	2.800.000.000	2.735.913.000	2.631.237.000
2	Belanja uang lembur	900.374.000	300.500.000	371.410.000
C	Belanja Barang dan jasa	26.776.440.000	18.170.516.244	22.980.891.191
1	Belanja barang dan jasa	20.556.000.000	4.930.589.274	6.661.175.447
2	Belanja barang dan jasa	6.220.440.000	13.239.926.970	16.319.515.744
D	Belanja Modal	36.612.658.755	24.737.793.986	9.601.849.493
1	Belanja modal gedung dan bangunan	4.235.188.000	3.555.718.000	3.916.754.441
2	Belanja modal irigasi	12.144.760.000	6.952.080.671	144.108.152
3	Belanja modal lainnya	200.710.000	183.810.000	666.356.500
4	Belanja modal jaringan	20.032.000.755	14.046.185.315	4.874.630.400

Medan, 17 Desember 2021
Kepala Keuangan
Balai Wilayah Sungai Sumatera II


RISWATY
 NIP.196911112007012000

4. Tabel Hasil Penelitian

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis

Uraian	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
Tahun 2019			
Belanja Pegawai	108,53%	Tidak Ekonomis	($x > 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	97,35%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	98,41%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Tahun 2020			
Belanja Pegawai	101,21%	Tidak Ekonomis	($x > 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	85,43%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	97,50%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Tahun 2021			
Belanja Pegawai	90,08%	Ekonomis	($x > 100\%$)
Belanja Barang dan Jasa	82,31%	Ekonomis	($x < 100\%$)
Belanja Modal	97,60%	Ekonomis	($X < 100\%$)

Sumber: Peneliti, 2022

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi

Tahun	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
2019	35,78%	Efisien	($x < 100\%$)
2020	28,73%	Efisien	($x < 100\%$)
2021	41,20%	Efisien	($x < 100\%$)

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas

Tahun	Hasil % Pencapaian	Keterangan	Standar Keterangan
2019	108,06%	Efektif	($x > 100\%$)
2020	100,88%	Efektif	($x > 100\%$)
2021	100,29%	Efektif	($x > 100\%$)



5. Surat Izin Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jl. Krdani No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7366168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Sena Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas ekonomid@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/V/2022 23 Mei 2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : CHURIN HUSNIA ANTI
N P M : 188330003
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wani Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

6. Surat Balasan Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
JL. JEND. BESAR DR. A.H. NASUTION NO.30 PKL. MASYHUR TELP. : (061) 7861622 – 7861533 FAX. (061) 7861455 KODEPOS 20143 MEDAN

Nomor : HM.05.06-Bws2/464
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Izin Research/Survey. Medan, 24 Mei 2022

Kepada Yth,
Universitas Medan Area
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nomor: 1640/FEB/01.1/V/2022, tanggal 22 Mei 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Balai Wilayah Sungai Sumatera II dapat memberi izin Research /Survey untuk Mahasiswa yang bernama **Churin Husnia Anti, NPM: 188330003**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib membawa identitas diri (Kartu Mahasiswa dan KTP) Asli;
2. Mahasiswa wajib mentaati prosedur dan peraturan yang berlaku di Balai Wilayah Sungai Sumatera II;
3. Mahasiswa memakai busana atasan warna putih dan bawahan warna gelap;
4. Mahasiswa menyiapkan sendiri perlengkapan, peralatan kerja, dan lain-lain yang diperlukan;
5. Mahasiswa Wajib merahasiakan segala data/dokumen milik Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berkualitas rahasia;
6. Mahasiswa bertanggung jawab atas ketidaksesuaian data yang disebabkan oleh Mahasiswa yang melaksanakan riset;
7. Mahasiswa menanggung sendiri biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi yang diperlukan selama melaksanakan Research.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

An.Kepala BWS SII
Kasubag Umum dan Tata Usaha

Muhammad Daud, ST
NIP. 197011271997071001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala BWS Sumatera II (sebagai laporan)